

STRATEGI PARTAI ENNAHDAH DALAM DINAMIKA POLITIK DI TUNISIA PADA TAHUN 2014-2020

Muhammad Fauzan Irvan*¹ dan M. Hamdan Basyar²

¹Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

²Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional

*Corresponding Author:

Email: fauzanirfan6@gmail.com

Abstract.

Initially, Ennahda was a political party in Tunisia with an ideology of Islamism. When Ennahda won the general elections in 2011, the party was more compromised by the political realities around it and was rational in its political attitudes and actions. In 2015, Ennahda formed a coalition government with electoral winning parties as well as pro-secularist political rivals, the Nidaa Tounes party. At the 10th congress on May 20 2016, Ennahda issued an official statement that the party was separating itself between religious and political activities. This study aims to explain the reasons and factors that led to changes in political strategy that occurred in the Ennahda party in Tunisia. Analysis of changes in Ennahda's political strategy will be reviewed through Post-Islamism and Constructivism Theory. This study uses secondary data collected through library research studies and analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the study show that the reasons and factors that led to changes in the political strategy of the Ennahda party in Tunisia in 2016 were due to new political challenges, namely the condition of a pluralistic political environment and demands for compromise in the framework of building a civil society; the emergence of hard-line Islamic movements and extremist groups in Tunisia; the military coup against the Muslim Brotherhood in Egypt in 2013; and growing public discontent with the party-led government coalition.

Keywords: Ennahda, Post-Islamism, Islamism

1. PENDAHULUAN

Tunisia merupakan sebuah negara yang mempunyai letak geografis di bagian utara Benua Afrika. Secara geografis Tunisia terletak di sebelah utara dan timur yang berbatasan langsung dengan laut mediterania, di sebelah tenggara dan selatan tunia juga berbatasan dengan negara Libya, dan di sebelah barat berbatasan dengan *Al-Jazair*. Sejak merdeka dari Prancis, 1956, sampai dengan peristiwa Arab Spring, 2011, Tunisia baru memiliki dua Presiden, yaitu Habib Bourguiba dan Zein al-Abidin Ben Ali. Presiden Bourguiba memimpin tongkat kekuasaan Tunisia kurang lebih dalam kurun waktu tiga puluh tahun, tepatnya sekitar tahun 1957 sampai dengan 1987. Pada saat Bourguiba berkuasa, Tunisia cenderung bersifat modernisasi dan westernisasi. Bourguiba menjadi otoriter bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan memang beberapa kali pemilu dilaksanakan partai yang di dalamnya ada Bourguiba sangat dominan dan kekuasaannya tidak terkendali, bahkan pernah disebut sebagai pemimpin Tunisia selamanya tepatnya pada tahun 1975. Akan tetapi, Bourguiba berhasil digulingkan oleh Zein Al-Abidin Ben Ali melalui kudeta damai (Sukandi,2016).

Pada tahun 1987, melalui Kudeta damai Ben Ali meruntuhkan kekuasaan Habib Bourguiba. Ben Ali diawal kekuasaannya menyatakan bahwa akan “Melunakkan” sebagian besar dari tindakan keras politik dan otoriter Bourguiba terhadap gerakan oposisi. Ben Ali melakukan beberapa upaya untuk melonggarkan beberapa aturan yang dianggap mempunyai sifat kekerasan seperti mengekang kebebasan media dan melepaskan tahanan yang dikurung pada saat pemerintahan Bourguiba berkuasa. Bahkan Ben Ali sampai

membuat sebuah pernyataan yang bersifat sindiran terhadap Bourguiba yang berbunyi *“The era we live in can no longer stand for a president for life, nor an automatic succession to the head of the state from which the people excluded”* (Marcovitz, 2014).

Kemenangan Ben Ali pada waktu itu memperlihatkan bagaimana masyarakat Tunisia menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis bukan otoriter. Pemerintahan yang lunak terhadap agama, kebebasan dalam bersuara dan kebebasan dalam menentukan pilihan adalah hal yang telah diinginkan oleh masyarakat Tunisia sejak lama dan hal ini diwujudkan oleh Ben Ali selaku Presiden Tunisia yang bisa menggulingkan kekuasaan Presiden Bourguiba (Ghafur, 2014 : 92). Akan tetapi pada tahun kedua kepemimpinannya menjadi sebagai Presiden, Ben Ali kembali menjalankan pemerintahan persis dengan apa yang dijalani oleh Bourguiba, yakni menggunakan sistem otoriter dan diktator. Selama empat tahun Ben Ali berkuasa, ia menciptakan kebijakan otoriter seperti dengan melarang Hizbut Ennahda (Partai Kebangkitan) yang melegalkan status kepartaiannya dan menyatakan partai tersebut merupakan cabang dari *Mouvement de la Tendance Islamique*.

Ben Ali juga membatasi ruang gerak pimpinan Hizbut Ennahdah yaitu Rached Ghannouchi. Pelarangan ini jelas pengingkaran janji Ben Ali yang ingin menciptakan sistem multi partai di Tunisia. Pada 12 Juli 1992, Ben Ali mengambil langkah politik yang semakin jauh dari demokrasi, yaitu dengan menghukum 280 anggota Ennahda bersalah karena menjadi bagian dari gerakan anti pemerintah, bahkan lima puluh diantaranya di ancam hukuman mati. Kasus ini kemudian disoroti sebagai pengadilan paling keras dalam sejarah Tunisia (Sahide & Satris, 2021). Kasus ini juga menarik negara-negara barat dan kelompok HAM Internasional. Tindakan represif terhadap pemimpin oposisi serta aktivis HAM juga semakin meningkat. Tahun 1994, Moncef Marzouki, Sekretaris Jenderal Liga Hak Asasi Manusia ditahan rezim Ben Ali. Beberapa Pers Nasional melarang meliput dan menginvestigasi kasus tersebut.

Pada era kekuasaannya, Ben Ali tidak memberikan ruang kebebasan pers, jaringan komunikasi lewat internet di sensor, komunikasi lewat surel dan telepon di monitor, serta pihak oposisi diparlemen tidak mampu bersuara. Hampir tidak ada aktivis yang dapat menolak keinginan Ben Ali tersebut. Di samping itu, Rezim itu juga memenjarakan ribuan kelompok oposisi selama 23 tahun pemerintahannya (Trisnaningtyas, 2022). Atas dasar tindakan pengkhianatan Ben Ali Terhadap masyarakatnya, banyak rentetan kejadian yang membuat bermunculan gerakan-gerakan perlawanan rakyat yang dimulai dengan aksi bakar diri dari salah satu rakyat Tunisia bernama Mohammad Bouazizi dan peristiwa itu dikenal dengan sebutan *“The Arab Springs”*.

Aksi Bouazizi dan rakyat Tunisia lebih jauh turut menginspirasi gerakan serupa di negara-negara lain di regional Timur Tengah. Di Mesir, revolusi rakyat berhasil menjatuhkan pemerintahan Mubarak. Di Libya, gerakan anti-Khadafy mengadakan perlawanan bersenjata. begitu pula halnya di Sudan, Yaman, dan Bahrain (Saleem, 2012:14). Berbagai perubahan dan restrukturisasi kepemimpinan di wilayah yang dilanda konflik berangsur-angsur membawa arah baru demokratisasi. Aksi bakar diri Bouazizi dan demonstrasi besar-besaran yang terus berlanjut di penjuruk kota akhirnya memaksa rezim Ben Ali mundur dari kekuasaannya yang selama ini dibangun di atas tangan besi (Sahide et al, 2015:20).

Pasca terjadinya Arab Spring, konstelasi politik di Tunisia menunjukkan perkembangan gelombang demokrasi yang cukup signifikan. Di antara negara-negara lainnya yang mengalami Arab Spring, Tunisia dianggap satu-satunya yang sukses dalam transisi politik. Kondisi ini dinilai sebagai *“the only success story among the revolutionary states”*.

Setelah melewati banyak gejolak dan masa persiapan pemilu pertama pasca Arab Spring, akhirnya pemilihan umum pertama pasca Arab Spring berlangsung pada 23 Oktober 2011. Ini pemilu pertama yang bebas dan demokratis di Tunisia. Dengan tingkat partisipasi 86 % untuk pemilih sukarela dan tingkat partisipasi 16 % untuk pemilih yang terdaftar secara otomatis (The Carter Center, 2011:5). Hasil akhir yang di keluarkan oleh ISIE menunjukan dari 8,2 juta pemilih yang berhak memilih, tingkat partisipasi tercatat sebanyak 52%. Dengan jumlah 4.123.602 yang terdaftar untuk memilih, hanya 3.702.627 yang benar-benar memberikan suara pada tanggal 23 Oktober. Dari total 217 kursi parlemen yang dibutuhkan di Tunisia, hasil pemilihan terhitung 41% hasil suara dimenangkan oleh partai Ennahda, dengan 89 kursi parlemen dari 217 yang berhasil diduduki (Saidin dan Alfitri, 2020:58).

Kemenangan partai Islam Ennahda pada tahun 2011 menjadi titik awal yang membuat Tunisia menjadi negara demokrasi dengan berbagai upaya yang dilakukan. Membangun karakteristik demokrasi dengan adanya sebuah pemisahan kekuasaan, pemilu yang bersifat bebas, kebebasan untuk warga sipil, hukum yang adil, kebebasan berpendapat dan rasa toleransi dalam beragama yang dinilai membutuhkan waktu tidak sebentar. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas mengenai strategi partai Ennahda dalam kiprah politiknya di Tunisia pada tahun 2014-2020.

II. METODE

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala atau fenomena sosial. Creswell (2016:4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokkan antara data yg sebenarnya dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Rumusan masalah yang diteliti menentukan pengamatan dan penelitian secara mendalam. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berpedoman pada tujuan tertentu atau fokus permasalahan tertentu. Penelitian kualitatif mencoba untuk mengerti, mendalami, dan menyelam masuk di dalamnya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan fenomena-fenomena tersebut sesuai dengan konteksnya. Sehingga dicapai suatu kesimpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks tersebut yang sifatnya subjektivitas (Creswell, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *Post-Islamism* dan teori konstruktivisme dalam melakukan analisis strategi politik Ennahda di Tunisia pada tahun 2014-2020. Pemikiran mengenai *Post-Islamisme* secara umum muncul untuk menjadi sebuah jawaban dari ketidakmampuan Islamisme dalam menangani permasalahan-permasalahan proses perubahan yang bersifat sosial, budaya ekonomi, dan politik dari terus berkembangnya dinamika kehidupan sosial secara global. *Post-Islamism* ditandai dengan adanya upaya membatasi peranan politisasi agama islam (Bayat,1996). Islamisme disebut juga dengan sebutan Islam Politik mengacu pada gagasan bahwa Islam tidak hanya menyediakan pedoman untuk kehidupan sosial dan pribadi, akan tetapi juga untuk ruang politik.

Haluan *Post-Islamism* berbeda dengan ideologi politik Islamisme yang menolak nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berekspresi, toleransi pluralisme (Tibi,2012), dan kesetaraan gender. Ide dari adanya *Post-Islamism* ini dapat ditandai dengan adanya usaha untuk membatasi peranan politisasi agama Islam (Bayat,1996). Negara yang berhaluan *Post-Islamism* dalam menjalankan pemerintahannya tidak lagi memperjuangkan berdirinya negara berdasarkan syari'ah Islam. Akan tetapi, negara akan menampung beberapa aspek sekularisme pasif dan Islamisme pasif dalam kerangka demokrasi sehingga akan membentuk pola rumusan baru yang mencakup kepentingan-kepentingan golongan tertentu, namun untuk mewakili dari setiap kelompok yang ada dengan suatu fokus pada pembangunan ekonomi, keadilan dan keadilan sosial ekonomi yang mempunyai ruang lingkup lebih luas.

Adapun penelitian ini akan menggunakan poin penting untuk menganalisa hasil dari penelitian itu sendiri. Menurut Alexander Wendt, teori Konstruktivisme setidaknya terdiri dari tiga poin penting, yaitu : (1) Sosial, (2) Ideasional, dan (3) Intersubjektivitas (Folger,2003). Ketiga prinsip tersebut adalah konsep awal yang dijelaskan oleh Wendt untuk menjelaskan dan membahas fenomena-fenomena sosial yang terjadi, yang dituangkan kedalam pendekatan Konstruktivisme.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awalnya partai Ennahdah merupakan partai aliran Islam yang mencampurkan aturan-aturan Islam ke dalam politik Tunisia. Awalnya tindakan ini disebut dengan “tindakan Islam”, Ennahdah melakukan penekanan dalam pergerakannya dengan sebutan “Kecendrungan Islam”. Akan tetapi seiring berjalannya waktu Ennahdah yang sebelumnya memiliki ideologi Islamisme garis keras telah merubah ideologinya sendiri menjadi *Post-Islamisme*, hal ini bertujuan untuk memisahkan antara politik dan agama.

Keputusan Ennahdah untuk memisahkan aktivitas politik dan agama mengacu pada gagasan pemikiran bahwa Islamisme, simbol-simbol maupun segala bentuk upaya Islamisasi pada setiap bidang persoalan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya telah kehilangan daya tariknya. Oleh karena itu, kehadiran Islamisme dinilai sudah tidak mampu untuk menjawab persoalan-persoalan proses perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari perkembangan dinamika yang terjadi secara global. Dalam konteks pemerintahan pasca kekuasaan otoriter El Abidine Ben Ali, gagasan serta agenda Islamisme menjadi sangat tidak relevan, hal ini dikarenakan adanya tuntutan demokratisasi dari rakyat Tunisia itu sendiri. Ennahdah menjadi lebih kompromi dengan realitas politik yang sudah ada dan menjadikan prioritas untuk mengedepankan pilihan rasional dalam menentukan sikap maupun pilihan politik. Hal ini membuat Ennahda mengubah haluan atau arah strategi politik partainya pada tahun 2016 yang dari awalnya menganut Islamisme dan kemudian berubah menjadi *Post-Islamism*.

Reformasi Politik Partai Ennahda

Pada periode rezim Habib Bourguiba dan rezim Zine El Abidine Ben Ali, Ennahda memperjuangkan platformnya atas dasar politik identitas. Namun sejak dilegalkan sebagai partai politik pada bulan Maret 2011, Ennahda lebih menampilkan strategi politik moderasi yang ditandai dengan kebijakan inklusif selama periode transisi demokrasi, khususnya ketika dalam menjalankan pemerintahan di Tunisia. Dalam konteks peran yang akan dimainkan Ennahda pada masa transisi demokrasi di Tunisia, moderasi disamakan dengan penerimaan mekanisme demokrasi, penghormatan terhadap prinsip kebebasan yang mendasar, dan dukungan formal untuk membangun masyarakat madani (*civil society*). Hal ini tidak terlepas dari peran seorang pemikir intelektual Islamis terkemuka dan termasuk pendiri Ennahda, Rachid Ghannouchi, yang merancang sistem pemikiran alternatif bagi Ennahda. Sehingga, pada akhirnya Ennahda berhasil memoderasi diri jauh sebelum peristiwa pemberontakan Arab yang terjadi pada tahun 2010.

Setelah peristiwa Arab Springs, Ennahda mengalami sebuah perubahan yang sangat signifikan bagi suatu kelompok yang memperjuangkan rangkaian agenda Islamis. Maka secara ideologis, Ennahda memutuskan untuk meninggalkan pola pemikiran politik identitas dan menerapkan strategi politik yang lebih sentral pada kebijakan praktis, seperti yang disampaikan oleh Rachid Ghannouchi bahwa : “*A modern state is not run through ideologies, big slogans and political wrangling, but rather through practical programs*” (Affan, 2016). Pernyataan tersebut menyebutkan bahwasanya negara modern tidak dijalankan melalui ideologi, slogan besar ini menjadi sebuah perselisihan politik, akan tetapi hal ini dilakukan melakukan program-program praktis. Memang sejak awal, Ennahda secara perlahan telah menunjukkan perubahan menuju sikap politik yang lebih moderat sejak periode kepemimpinannya.

Hal ini bisa dilihat pada keputusan akhir Ennahda yang bersedia untuk berkompromi dan bekerja di dalam sistem parlemen campuran. Ennahda akhirnya membuka diri untuk bekerja sama di dalam parlemen dengan partai haluan sekularisme (Ghannouchi, 2016). Hal yang lebih jelas lagi, bisa dilihat ketika pada tanggal 26 Maret 2012, Ennahda membuat keputusan bahwa syariah tidak akan dimasukkan ke dalam konstitusi (Wolf, 2017:139). Namun, ada perbedaan sikap politik Ennahda di masa kepemimpinannya dengan keputusan partai tersebut pada tahun 2016 yang tegas memisahkan aktivitas agama dan politik. Bila keputusan Ennahda pada tahun 2016 menghasilkan platform politik baru yang menolak Islam politik, maka pada periode pemerintahan partai tersebut di tahun 2011-2013 tampak masih ada perjuangan politik yang terindikasi ideologi Islamisme. Hal ini tampak pada keberhasilan usaha Ennahda dalam memasukkan gagasan Islam ke dalam konstitusi. Pasal 1 dalam undang-undang, yang pada 27 Januari 2014, telah menetapkan Islam sebagai agama resmi Tunisia dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi segala sesuatu yang dinilai sakral (Ayari, 2015).

Preambul konstitusi tersebut merefleksikan identitas muslim Arab Tunisia. Selain itu, adanya kalimat “negara sebagai pelindung segala sesuatu yang dianggap sakral” dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencegah penistaan terhadap agama. Ennahda pada periode pemerintahannya juga masih berupaya untuk menjalankan agenda Islamisme, seperti pembahasan tentang prinsip gender atau

emansipasi wanita. Meskipun pada akhirnya, Ennahda menyetujui tuntutan kelompok sekuler terkait permasalahan emansipasi wanita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rachid Ghannouchi : “*Women’s rights ‘are nowadays part of Tunisian identity. So Tunisia’s Islamists try to adapt Islam to [this] reality’*” (Wolf,2017). Hal ini menunjukkan bahwa, ketika Ennahda dihadapkan tekanan sosial-politik yang cukup dari para aktor politik, Ennahda bersedia membuat konsesi yang signifikan. Meskipun sikap dan perilaku politik Ennahda tersebut berarti mengorbankan nilai-nilai Islamisme yang kaku dan merangkul interpretasi yang sangat fleksibel dari ajaran Islam.

Dinamika Pemilihan Umum (Pemilu) di Tunisia

Pemilihan parlemen pada tahun 2019 telah menjadi pemilihan parlemen ketiga sejak revolusi Tunisia yang terjadi pada tahun 2011, tingkat angka partisipasi warga Tunisia dalam pemilihan parlemen kali ini hanya berkisar di angka 41 persen. Lembaga survei Tunisia juga telah merilis kemenangan Partai Islam Ennahda di Tunisia, Minggu 06 Oktober 2019. Survei ini dilakukan oleh lembaga Sigma Conseil menyatakan bahwa partai Ennahda meraig suara 17,5 persen atau unggul dari pesaingnya yaitu partai Heart of Tunisia yang mendapatkan perolehan suara sebesar 15,6 persen.

Atas kemenangan tersebut Ennahda akan mendapatkan perolehan 40 kursi atau membutuhkan 109 kursi tambahan untuk menguasai suara mayoritas di tubuh parlemen. Angka ini terlalu jauh untuk dicapai oleh Ennahda, padahal pada pemilu parlemen tahun 2014, Ennahda memperoleh 27,8 persen atau mendapatkan perolehan 69 kursi parlemen. Walaupun partai Ennahda mendapatkan kemenangan pada pemilu 2019, namun kemenangan yang tidak mutlak tersebut masih meninggalkan kelompok sekuler liberal yang terus menerus menentang peran politik Ennahda yang beraliran Islam dan perlu diketahui kelompok anti Ennahda ini telah ada sejak puluhan tahun di Tunisia yang menjadi sebuah kekuatan politik untuk menentang Ennahda.

Serangan terhadap kebijakan politik Islam Ennahda memang seperti tidak akan pernah berhenti, seperti pada pertengahan tahun 2019 setelah pelantikan Ghannouchi sebagai pimpinan parlemen Tunisia, telah terjadi gerakan mosi tidak percaya terhadap Ghannouchi dari kubu Sekuler. Namun, Kubu sekuler harus gigit jari karena tak berhasil memenuhi kuota dukungan sebesar 109 suara dari total 217 suara. Kubu sekuler hanya berhasil mendapatkan 97 suara saja, sementara 18 suara tidak sah dan yang mendukung Ghannouchi 132 suara. Kubu pro Ennahda memang menang, akan tetapi kubu sekuler menyatakan bahwasanya perhitungan tersebut adalah perolehan hasil yang telah dimanipulasi dan menganggap perolehan suara tersebut tidak sah.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa alasan-alasan serta faktor yang menyebabkan perubahan strategi politik partai Ennahda di Tunisia dalam kurun waktu 2014-2020 dikarenakan adanya tantangan politik yang baru, yaitu sebuah kondisi lingkungan politik yang bersifat plural dan tuntutan kompromistik dalam agenda membangun masyarakat madani. Kemunculan gerakan Islam garis keras serta kelompok ekstremis di Tunisia telah menjadi tantangan tersendiri bagi Ennahda dalam menjalankan pemerintahan di Tunisia yang setelah pemilu tahun 2019 dinobatkan sebagai partai pemenang. Kemenangan tersebut memang didapatkan oleh partai Ennahda, akan tetapi dibalik hal itu telah membuat bermunculannya kubu-kubu pro sekuler yang sangat menentang Ennahda sebagai penguasa parlemen.

Atas dari hal tersebut, partai Ennahda melakukan sebuah strategi politik yang dicirikan dengan identitas baru sebagai “demokrat muslim” yang dimaksudkan agar partai Ennahda lebih moderat terhadap kelompok muslim maupun kelompok non-muslim. Rachid Ghannouchi menjelaskan bahwa tujuan Ennahda adalah untuk memberikan sebuah perlindungan konstitusi bagi kelompok non-muslim maupun yang atheis. Tidak hanya itu, Ennahda juga ingin membuat perbedaan yang terlihat jelas antara kelompok ekstremisme serta terorisme dengan menjadikan partainya sebagai partai politik yang memiliki gerakan moderat dan tujuan strategi politik yang dilancarkan oleh Ennahda ini juga untuk melawan ekstremisme yang ada di Tunisia.

REFERENSI

- Ayari, F. 2015. Ennahda movement in power: a long path to democracy. *Contemporary Review of the Middle East*. Vol. 2, No.1-2, Hal. 135-142.
- Bayat, A. 1996. The coming of a post-islamist society. *Critique: Critical Middle Eastern Studies*. Vol. 5, No. 9, Hal. 43-52.
- Center, C. (2011). National Constituent Assembly Elections in Tunisia: Final Report.
- Creswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Creswell, John W. (2017). *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Ghannouchi, R. 2016. From Political Islam to Muslim Democracy The Ennahda Party and the Future of Tunisia. *Foreign Affairs*: <https://www.foreignaffairs.com/articles/tunisia/political-islam-muslim-democracy>. [Diakses pada tanggal 15 Januari 2017].
- Marcovitz. (2014). *The Arab Spring Uprisings*. San Diego, Reference Point Press, hlm. 27 Ghafur, Fakhry. (2014). "Religion and Democracy: The Emergence of The Power of Political Islam In Tunisia, Egypt And Libya". Jakarta: LIPI. <http://Ejournal.Politik.Lipi.Go.Id/Index.Php/Jpp/Article/Viewfile/203/87>
- Njie, Y. H., & Özoral, B. (2022). Aftermath of the Arab Spring on Demoratic Consolidation in Tunisia and Libya. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi*, 3(2), 32-55.
- Sahide Ahmad. (2015). "The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya," *Jurnal Hubungan International* 4, no. 2, 20–22.
- Sahide, A., & Satris, R. (2021). Indonesian Democracy as A Model for Egypt after The Arab Spring. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 133–147. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.16222>
- Saidin, M. I. S. and Alfitri, N. A. (2020). "State Feminism" dan Perjuangan Wanita di Tunisia Pasca Arab Spring 2011. *International Journal of Islamic Thought*, 12(1), 54–64.
- Saleem, Ed. (2012). *The Arab Revolution: Hopes, Challenges, and Transitions*. London: The Cordoba Foundation, Vol. 6 Ed. 10. Hlm. 4
- Sukandi, Ahmad. (2016). *Politik Bourguiba Tentang Hukum Keluarga Di Tunisia (1957-1987)*. Asas: *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.
- Tibi, B. 2012. *Islamism and Islam*. New Haven & London: Yale University Press.
- Trisnaningtyas. (2022). Forecasting Tunisia's Future: A Lesson Learned from the Past". *International Journal of Demos*. Volume 4, Issue 1, April